

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Asshidiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshidiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Asshidiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Asshidiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi II, 2006.
- Asshidiqie, Jimly. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Asshidiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Sekjen dan Kepanitraan MK RI, 2008.
- Astawa, I Gede Pantja. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- Apeldoorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- Bachtiar. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Jakarta: Raih Asas Sukses, 2015.
- Bologne's Jack. *The Accountants Handbook of Fraud and Commercial Crime*. New York John Wiley & Sons, Inc, 1995.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2002.
- Cahyono, Heru. *Dinamika Demokratisasi Desa di Beberapa Daerah di Indonesia Pasca 1999*. Jakarta: LIPI, 2006.
- Fatkhurrohman. *Memahami Keberadaan Mahakamah Konstitusi di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Gultom, Lodewijk. *Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia*. Bandung: Utomo Bandung, 2007.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi*. Malang: Setara Press, 2015.

- Hoesein, Zainal Arifin. *Judicial Review di Mahkamah Agung Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Ibrahim, Muhammad. *Pembatasan Kekuasaan Amandemen Konstitusi: Teori, Praktik di Beberapa Negara dan Relevansinya di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2020.
- Kamis, Margarito. *Kekuasaan Presiden Indonesia Sejarah Kekuasaan Presiden Sejak Merdeka Hingga Reformasi Politik*. Malang: Setara Press, 2014.
- Logeman, J.H.A. *Over de Theori van Een Stelling Staatsrecht*. Universitas Pers Leiden. Terjemahan Makkatutu dan Pengkerejo. *Tentang Toeri Suatu Hukum Tata Negara Positif*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1975.
- Manan, Bagir. *Konvensi Ketatanegaraan*. Bandung: Armico, 1987.
- Maran, Rafael Raga. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Revisi Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.
- Muchsan. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Nurdin, Ismail dan Hartati, Sri. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019.
- Nurcholis. *Penyelenggara Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press, 2014.
- Pieris, John. *Pembatasan Konstitusional Presiden RI*. Jakarta: Pelangi Cendekia, 2001.
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Rapar, J. *Filsafat Politik Aristoteles*. Jakarta: Rajawali Press, 1988.
- Riza Multazam Luthfy, “Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol 48, No 4, (2019).
- Rusyan, H.A. Tabrani. *Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Rudy. *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: Aura Publisher, CV. Anugrah Utama Raharja, 2022.

- Rumokoy, Donald A. *Praktik Konvensi Ketatanegaraan Di Indonesia: Kajian Perbandingan Di Inggris, Amerika Serikat, Dan Belanda*. Jakarta: Media Prima Aksara, 2011.
- Sibuea, Hotma P. *Asas-Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Sidharta, Arief. *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.
- Soephiady, Soetanto. *Undang-Undang Dasar 45: Kekosongan Politik Hukum Makro*. Yogyakarta: Kepel Press, 2004.
- Syahrizal, Ahmad. *Peradilan Konstitusi: Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Tanya, Bernard L. *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*. Jakarta: GENTA Publishing, 2016.
- Thalib, Hamidi & Ni'matul Huda. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Widjaja, H.A.W. *Otonomi Desa merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Yunanto, Sutoro Eko. *Implementasi UU Desa: Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi*. Jawa Timur: Inteligensia Intrans Publishing, 2018.
- Yusa, I Gede. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. Malang: Setara Press, 2016.

## **JURNAL**

- Abdul Rahman Maulana Siregar, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945”, *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 5, No. 5, (2017).
- Abdul Fatah Fanani, Wahyu Astutik, Dodik Wahyono, Suprpto, “Analisis Undang-Undang Desa”, *Jurnal Dialektika* Vol. 4, No. 1, (2019).
- Amaliatulwalidain, “Sistem Pemerintahan Desa Dalam Tinjauan Sejarah Politik Di Indonesia”, *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, Vol. 2, No. 1, (2017).

- Amancik, Putra Perdana Ahmad Saifulloh, Sonia Ivana Barus, “*Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*”, Jurnal RechtsVinding, Vol. 12, No. 1, (2023).
- Bagoes Sunarjanto, “*Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Perumusan Kebijakan Publik*”, Jurnal Widya Publika, Vol. 7, No. 1, (2019).
- Bagas Pribadi, “*Problematika Wacana Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Upaya Optimalisasi Kinerja Pemerintah Desa*”, VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Hukum, Vol. 9, No. 1, (2023).
- Bayu Aryanto, “*Demokrasi Deliberatif Dalam Konsep Amandemen Konstitusi Indonesia*”, Mulawarman Law Review, Vol. 5, No. 2, (2020).
- Cipto Prayitno, “*Pembatasan Perubahan Bentuk Negara Kesatuan Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Constitution Making*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No. 4, (2018).
- Cora Elly Novianti, “*Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 2, (2023).
- Elsan Yudhistira, “*Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse Of Power*”, AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 23, No. 2, (2020).
- Gufron, “*Hubungan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam Konsep Otonomi Pasca Reformasi di Indonesia*”, Yogyakarta: Tesis Magister Universitas Islam Indonesia, (2016).
- Huda M, “*Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 4, No. 3, (2017).
- Ika Kurniawati dan Lusi Liany, “*Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*”, Jurnal ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 1, (2019).
- Kushandajani, “*Implikasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 2, No. 1, (2016).
- M. Laica Marzuki, “*Konstitusi Dan Konstitusionalisme*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 4, (2015).
- Mohammad Ibrahim, “*Pembatasan Kekuasaan Amandemen Konstitusi: Teori, Praktik di Beberapa Negara dan Relevansinya di Indonesia*”, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, (2020).

- Putra Perdana Ahmad Saifulloh, “*Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Di Indonesia*”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 47, No. 4, (2017).
- Radian Salman, “*Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Konstitusionalisme dan Demokrasi*”, Disertasi Universitas Airlangga, (2017).
- Rantika Safitri, “*Analisis Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Taman Jaya*”, Jurnal Petitum, Vol. 2, No. 1, (2022).
- Retno Saraswati, “*Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan (Ius Constituendum)*”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 43, No. 3, (2014).
- Retno Saraswati, “*Reorientasi Hukum Pemilukada yang Mensejahterakan Rakyatnya*”, Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jenderal Soedirman, (2014).
- Riza Multazam Luthfy, “*Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi*”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 48, No. 4, (2019).
- Sakinah Nadir, “*Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*”, Jurnal Politik Profetik, Vol. 1, No. 1, (2014).
- Saiful Ichwan, “*Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*”, Jurnal Noken, Vol. 5, No. 1, (2019).
- Sandy Mulia Arhdan, “*Problematika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Prinsip Negara Demokrasi*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 2, (2023).
- Sutrisno Purwohadi Mulyono, “*Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 43, No. 3, (2014).
- Syukri Asy’ari, Meyrinda Rahmawaty Hilupto, dan Mohammad Mahrus Ali, “*Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 4, (2014).
- Syaifullahil Maslul, “*Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2022*”, Jurnal Literasi Hukum, Vol. 6, No. 2, (2022).
- Wishnu Dewanto, “*Tinjauan Hukum Implementasi Sistem Demokrasi Pancasila Melalui Pemilihan Umum Langsung di Indonesia*”, Tesis Universitas Jama Jagakarsa, (2017).

Yusrianto Kadir dan Roy Marthen Moonti, “*Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa*”, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 6, No. 3, (2018).

Zainal, “*Dinamika Kebijakan Pemerintahan Desa di Indonesia dari Masa ke Masa (Studi Tahun 1995-2015)*”, Jurnal TAPIS, Vol. 12, No. 1, (2016).

Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, “*Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*”, Jurnal Negara Hukum, Vol. 9, No. 1, (2018).

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## **PUTUSAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia Nomor 15/PUU-XXI/2023.

## **INTERNET**

Ida, L. “*Undang-Undang Desa dan Tantangannya*”, Harian Kompas, 2014.

Indonesia Corruption Watch. “Sesat Pikir Perpanjangan Masa Jabatan Kades: Niat Buruk Politisasi Desa dan Suburkan Oligarki Desa.” Diakses pada tanggal 20 Maret 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Mahkamah Konstitusi, Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>